

**QUO VADIS TRANSISI DEMOKRASI :
Arah Demokratisasi Indonesia ditengah Demokrasi Pasar**

Oleh

Ali Martin, SIP., MSi.

*Staff Pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang*

Abstract

This article examines the process of democratic transition that took place in several countries, especially Indonesia. Where is the democratic transition is the collapse of authoritarian regimes, the situation toward a democratic regime. But in reality it is not got to the transition towards a democratic regime, but can return to an authoritarian regime where there is a failure in the process of consolidating civilian, even a democratic transition happens now is controlled by the democratic form of market neo-liberalism. Indonesia is no exception to the democratic transition by adherence to a market democracy.

Keywords: *transition to democracy, authoritarian, democratic market*

A. Pendahuluan

Beberapa dekade dasawarsa terakhir beberapa negara di belahan dunia menampilkan perubahan gelombang demokrasi yang cukup signifikan, yang ditandai runtuhnya berbagai rezim otoriter di beberapa negara tersebut. Meskipun seiring jatuhnya sebuah rezim otoriter tadi tidaklah musti menguatnya kekuatan perlawanan gerakan pro-demokrasi *an-sich* di suatu negara tersebut, namun juga intervensi dari rezim internasional atau negara lain disinyalir mengikuti didalamnya. Dan dari berbagai kasus jatuhnya sebuah rezim otoriter di beberapa negara di belahan dunia, semisal Saddam Husein di Irak contohnya, dapat dipastikan beragam factor yang melingkupinya, baik domestic dalam negeri maupun factor internasional lainnya semisal kepentingan internasional yang berkaitan dengan keberlangsungan demokrasi pasar (*neo-liberalisme, kapitalisme global*) terlihat jelas ikut serta andil di dalamnya¹.

Dari beragam kasus rezim tersebut dengan bermacam sebab dan persoalannya, tidak terkecuali terjadi di Indonesia. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru di Indonesia yang otoriter dan militeristik, banyak kalangan pengamat mengatakan bahwa Indonesia telah disebut sebuah negara yang memasuki

¹ Contoh yang jelas adalah agresi militer AS ke berbagai negeri untuk mengamankan kepentingan ekonominya. Agresi ke Afganistan, misalnya, adalah untuk mengamankan pembangunan jalur gas dan minyak dari Azerbaijan yang dikelola oleh Azerbaijan International Operating Company (AIOC), sebuah konsorsium perusahaan minyak multinasional yang didalamnya antara lain Unocal, Amoco, Exxon dan Pennzoil - perusahaan-perusahaan minyak AS. Sementara Agresi ke Irak, adalah untuk merebut sumur-sumur minyak Irak. Setelah AS menduduki Irak, kemudian membagi tender dan kontrak untuk "pembangunan kembali Irak" pada perusahaan-perusahaan Amerika.

suatu masa transisi, bahwa Indonesia pada masa kini berada dalam periode transisi menuju demokrasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru hampir semua pengamatpun mengkategorikan bahwa Indonesia sebagai sebuah rezim yang tidak demokratis. Ataupun misalnya dapat dikatakan sebagai negara demokrasi tetapi sifatnya demokrasi semu (*pseudo democracy*)². Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia era Orde Baru sebagai sebuah pemerintahan yang *authoritarian bureaucratic*³. Demokrasi tetap berlangsung dengan adanya Pemilu secara periodik, akan tetapi demokrasi yang selama Orde Baru malah digunakan sebagai alat represif bagi politik pembangunanisme (*developmentalism*) dengan bermacam-macam jargonnya.

Pada masa transisi dimana dari bentuk pemerintahan authoritarian menuju demokratis di negara-negara berkembang dan dibelahan dunia lainnya, ternyata kini telah menjadi perhatian para kalangan ilmuwan. Situasi transisi yang mana diandaikan akan menghadirkan sebuah rezim demokrasi sejati dengan melakukan pembedaan dengan model demokrasi rezim sebelumnya. Indonesia-pun tak lepas dari pengamatan bagaimana proses demokratisasi itu berjalan. Karena di sistem politik Indonesia terdapat unsur penduduk yang besar dan luasnya wilayah – teritorial, maka eksperimen dari authoritarian menuju demokrasi merupakan pengalaman yang sangat unik dan menarik. Pada tulisan kesempatan ini akan melihat

² Dikatakan demokrasi semu (*pseudo democracy*) disebabkan meskipun Orde Baru melangsungkan Pemilu akan tetapi Pemilu yang telah didesain, diatur dan direkayasa untuk melanggengkan kekuasaan rezim yang berkuasa. Lihat R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru, 1992*, LP3ES : Jakarta.

³ Hal ini dimaksudkan rezim otoriter yang ditopang oleh kekuasaan birokratik yang hegemonic.

proses transisi demokratisasi di negara berkembang dari pendekatan konseptual. *Pertama*, bagaimana sesungguhnya proses demokratisasi itu terjadi. *Kedua*, bagaimana pula proses menuju demokrasi itu terjadi di negara-negara berkembang.

B. Tinjauan Teoritis

Sebelum mengkaji lebih jauh secara konseptual periode transisi menuju demokrasi, sudah seharusnya terlebih dahulu melihat apa yang disebut transisi itu. Dalam pandangan Guillermo O'Donnell dan Philippe C Schmitter⁴, "transisi" adalah interval (selang waktu) antara satu rezim politik dan rezim politik yang lain. Transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan beberapa suatu alternatif revolusioner. Selain itu ia juga menilai, sudah jadi ciri dan karakteristik masa ini yakni tidak menentunya aturan main (*regulasi*) politik. Hal itu semua dikarenakan, tidak hanya aturan atau regulasi tersebut selalu berubah terus menerus dalam masa transisi itu tetapi juga karena regulasi tersebut diperhadapkan antar elit politik. Masih menurut pandangan O'Donnell dan Schmitter, selama masa transisi jika memang ada aturan-aturan (*regulasi*) yang efektif, cenderung berada dalam genggam pemerintah otoriter, biasanya penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya (*power*) untuk menentukan aturan regulasi dan hak-hak yang dalam kondisi demokrasi yang mantap akan dikelilingi oleh perundangan atau regulasi lainnya. Maka oleh karena itu

penguasa akan berusaha memodifikasi aturan itu demi kepentingan-kepentingan dirinya, dalam hal ini kekuasaan (*power*) tersebut tadi.

Kemudian selain tersebut diatas, istilah lain yang perlu mendapat perhatian adalah demokratisasi. Menurut pandangan O'Donnell prinsip yang paling penting dalam demokrasi adalah kewarganegaraan (*citizenship*). Sedangkan menurut Lyman Tower Sargent⁵ unsur-unsur yang terpenting dalam demokrasi adalah adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, kesederajatan diantara warga negara, kesederajatan kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan warga negara, sistem perwakilan dan sistem pemilu. Sedangkan proses demokratisasi, jika menengok dua istilah itu, merujuk kepada proses-proses dimana aturan-aturan regulasi dan prosedur kewarganegaraan dipraktikkan pada lembaga-lembaga politik yang dulu dijalankan dengan prinsip-prinsip lain (misalnya pengawasan dengan kekerasan, tradisi masyarakat, pertimbangan para pakar, praktik administratif) diperluas sehingga melingkupi mereka yang sebelumnya tidak ikut menikmati hak dan kewajiban (misalnya golongan bebas pajak, kaum buta huruf, wanita, remaja, golongan etnis minoritas dan warga negara asing). Demikian pula jika aturan lama itu diperluas sehingga meliputi isu-isu dan lembaga-lembaga yang semula tidak menjadi wilayah partisipasi masyarakat seperti lembaga politik, badan-badan pemerintahan, jajaran militer, asosiasi kepentingan dan lembaga pendidikan. Dengan kata lain sebuah proses

⁴ Guillermo O'Donnell dan Philippe C Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi*. 1993, LP3ES : Jakarta, hal.6.

⁵ Lyman Tower Sargent, *Contemporary Political Ideologies*. Homewood, The Dorsey Press, 1981, hal. 30-31.

demokratisasi merupakan perluasan partisipasi masyarakat dalam berbagai keputusan politik.

C. Pembahasan

Proses Transisi Demokrasi; berbagai perspektif

Proses transisi menuju demokrasi kini telah menarik perhatian para ilmuwan politik khususnya studi pembangunan politik. Ada sejumlah pendekatan konseptual di sini untuk dapat meneropong proses transisi menuju demokrasi. Menurut Adam Przeworski (1991)⁶ menggunakan konsep "hardliners" dan "softliners" dalam mengembangkan model *game-theoretic* dalam menganalisa kejatuhan sebuah rezim autoritarian. Sedangkan Donal Share dan Scott Mainwaring (1986)⁷ memberikan pendekatan transisional yang diawali dari konsepsi tentang perbedaan antara kelompok pembaharu yang dikontrol oleh pemimpin berkuasa dengan apa yang disebut "ruptulas" atau oposisi yang berada dalam kendali penguasa. Sedangkan ilmuwan lain seperti Michael Borton, Richard Gunter dan John Higley (1992) juga mengembangkan pengertian "democracy consolidation" menjadi konsep *elite settlements* dan *elite convergence*.

Kemudian ilmuwan politik ternama Samuel P. Huntington (1991) yang dahulunya disebut beraliran neo-konservatif menjadi diskursus demokratisasi gelombang ketiga yang menekankan pada tahap-tahap transisi⁸.

⁶ Adam Przeworski, *Democracy and The Market: Political and Economic reforms in Eastern Europe and Latin America*, Cambridge : University Press, 1991.

⁷ Lebih jauh lihat Scott, Gregory M., *Political Science: Foundations for a Fifth Millenium*. New Jersey, Prentice Hall, 1997.

⁸ Tahapan transisi dan gelombang demokrasi ini lebih jauh dapat dilihat dalam karya Samuel P. Huntington, *The Third Wave : Democratization in the Late*

Studi akan masa transisi ini kemudian menoleh kepada penekanan sisi masyarakat. Penekanan kepada peran masyarakat ini akhirnya memunculkan kesimpulan lain. Faktor struktural yang sebelumnya menjadi pusat perhatian bergeser ke faktor elit. Di sini perilaku elit menjadi variabel signifikan dalam menjelaskan tumbangnya sebuah rezim otoriter. Teori yang menekankan pada faktor elit tersebut pada beberapa hal sebenarnya berakar dari akar pemikiran, *pertama*, aktor kunci dalam proses transisi adalah elit politik, baik yang di dalam pemerintahan maupun oposisinya dan tidak lagi kelompok-kelompok kepentingan, organisasi massa, gerakan sosial atau kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. *Kedua*, aktor-aktor tersebut secara tipikal dibedakan menurut orientasi mereka terhadap perubahan rezim seperti moderat-ekstrem; dan menurut kepentingan yang berakar pada struktur dan kondisi ekonomi maupun peranan institusionalnya. *Ketiga*, aktor-aktor tersebut berperilaku strategis, tindakan-tindakan mereka dipengaruhi oleh tingkat penilaian mereka terhadap saingan maupun sekutunya sendiri. *Keempat*, demokrasi merupakan hasil dari negosiasi, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penekanan pada faktor elit, maka teori transisi menuju demokrasi menaruh perhatian besar dalam hal model, strategi maupun taktik. Share juga menawarkan tipologi transisi itu berlandaskan dua kriteria yaitu keterlibatan pemerintah yang berkuasa serta jangka waktu berlangsungnya proses itu. Tipologi itu dapat digambarkan sebagai berikut :

Twentieth Century; London : University of Oklahoma Press, 1991, yang diterjemahkan versi Indonesia *Gelombang demokratisasi ketiga*; Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2001.

Demokrasi melibatkan para pemimpin rezim ?

Ya

(konsensual)

Tidak (non-

konsensual)

Bertahap	Demokratisasi Secara Bertahap	Transisi Melalui Perjuangan Revolusioner
Cepat	Transisi Melalui Transaksi	Transisi Melalui Perpecahan : a. Revolusi b. Kudeta c. Keruntuhan d. Ekstrikasi

Dari bagan tersebut diatas, dapat tergambar bahwa demokratisasi itu dapat berlangsung cepat atau lambat. Demokratisasi secara bertahap merupakan transisi yang melibatkan para pemimpin yang sedang berkuasa. Demokratisasi seperti ini jarang terjadi kecuali di Inggris dan negara Eropa Utara. Sementara itu transisi melalui perjuangan revolusioner kecil kemungkinannya jika oposisi tumbuh bertahap di bawah rejim otoriter.

Sedangkan tipe transisi lainnya yaitu melalui perpecahan, tidak ada konsensus dan berlangsung cepat. Perpecahan biasanya terjadi karena; (a) revolusi yang digerakkan oleh kekuatan pro-demokrasi, (b) adanya kudeta dari kalangan elit militer atau polisi, (c) keruntuhan suatu rejim karena, misalnya, kalah perang ataupun (d) ekstrikasi (*ectrication*) yaitu rejim kehilangan otoriter secara tiba-tiba kehilangan legitimasinya dan tiba-tiba menyerahkan kekuasaannya kepada kekuatan oposisi yang demokratis. Ini terjadi misalnya di Argentina setelah Perang Malvinas. Transisi juga bisa terjadi melalui tipe transaksi. Tipe ini adalah transisi yang paling ideal

meskipun memiliki sejumlah syarat berat. *Pertama*, harus ada kemauan politik rezim otoriter untuk mengambil inisiatif ke arah reformasi politik yang mendukung transisi menuju demokrasi. Biasanya hal ini sulit terjadi. *Kedua*, kemampuan rezim untuk melakukan transisi melalui transaksi. Pada umumnya rezim penguasa akan berusaha membatasi tuntutan ke arah demokratisasi apabila merugikan dirinya. Kemudian persoalan yang muncul dari transisi ini biasanya adalah mungkinkah sebuah sistem otoriter berubah menjadi demokratis melalui transformasi dari dalam tanpa keruntuhan rezim tersebut.

Kerangka konseptual di atas bukanlah satu-satunya. Munc dan Leff (1997) menawarkan konsep lain berdasarkan studi empirik di Amerika Latin dan Eropa Timur yang terjadi pada awal 1990-an. Menurut mereka transisi menuju demokrasi tergantung pada identitas pelaku perubahan dan strategi yang dibawakan para pelaku perubahan. Dari dua variabel itu maka transisi menuju demokrasi bisa dilakukan oleh elit berkuasa, penentang elit dan keduanya. Masih menurut Munc dan Leff, reformasi dari bawah yang dilakukan penentang elit tetapi berlangsung dengan akomodasi dari para pelakunya seperti berlangsung di Cile. Model ini jarang terjadi dan tidak menjamin sepenuhnya terbentuk sistem yang demokratis. Sedangkan reformasi melalui transaksi terjadi antara lain di Polandia dan Brasil. Hal itu dikarenakan elit penguasa tak cukup memiliki kekuatan untuk menekan kekuatan pro-demokrasi. Sementara itu reformasi politik melalui ekstrikasi terjadi di Hongaria. Transisi di negeri ini berlangsung relatif mulus karena baik rezim komunis yang berkuasa maupun kelompok pro-demokrasi

melakukan perubahan secara terbuka. Ketika terjadi transisi itu, seluruh unsur politik berkumpul dalam sebuah rekonsiliasi nasional untuk membicarakan pemilu mendatang yang menjamin peralihan dengan lancar.

Kemudian juga terjadi reformasi melalui keruntuhan seperti terjadi di Argentina dan Cekoslowakia juga berlangsung karena elit politik dan oposisi berbenturan. Di Argentina perubahan terjadi karena kekalahan Perang Malvinas melawan Inggris. Setelah itu, kelompok masyarakat menentang peranan militer dalam politik. Sedangkan di Cekoslowakia lain lagi. Terjadinya Revolusi Ungu dipicu merebaknya ketidakpuasan dan aksi protes terhadap sikap represif penguasa terhadap mahasiswa bulan November 1989. Kemudian juga Revolusi dari atas seperti terjadi di Bulgaria disebabkan oleh faktor eksternal yaitu ambruknya rezim komunis Uni Soviet. Sebagian elit penguasa generasi muda mengadakan kudeta istana yang menumbangkan para pemimpin senior yang sudah kehilangan kepercayaan rakyat. Kudeta berjalan setelah berkonsultasi dengan Mikhail Gorbachev yang menunjukkan indikasi takkan campur tangan dalam urusan dalam negeri Bulgaria⁹.

Demokratisasi Indonesia; Transisi Demokrasi menuju Demokrasi Pasar ?

Selama rezim Orde Baru Indonesia di bawah kekuasaan rezim represif, yang berhasil menciptakan keamanan dan persatuan nasional dengan menggunakan kekuatan militer. Sikap represif tersebut juga dibarengi dengan sikap eksploitatif terhadap sumber daya alam yang

ada di berbagai daerah, juga terjadi korupsi di tingkat pusat kekuasaan, tanpa kontrol masyarakat. Akan tetapi begitu rezim orde baru mulai goyah, baik karena desakan kalangan pro-demokrasi, desakan dari kekuatan internasional, maupun akibat pembusukan dari dalam rezim itu sendiri, akibatnya kontrol terhadap rakyat mulai melemah. Pada saat itulah konflik horizontal yang selama ini bisa diredam mulai muncul ke permukaan, baik konflik vertikal maupun horisontal¹⁰.

Pada sisi yang lain harapan akan keberlangsungan demokrasi semakin tinggi. Ekspektasi masyarakat sipil semakin meningkat dengan era kebebasan yang telah dirasakannya. Hampir secara massif demokrasi di Indonesia juga semakin diyakini akan mewujudkan dengan ditandai hadirnya mekanisme multi partai, kebebasan mengemukakan pendapat secara terbuka, kemerdekaan pers dengan menjamurnya penerbitan. Bahkan semakin yakin dengan berlangsungnya prosesi suksesi kepemimpinan nasional yang berjalan relatif lancar pada 1999, 2004 dan 2009 tanpa gejolak yang begitu berarti. Transisi demokrasi, dalam kacamata ini dapat mengikuti tipologi Huntington, terbagi pada tiga pola antara lain; transformasi, penggantian (*replacement*), negosiasi (*transplacement*), dan intervensi¹¹. Dalam konteks Indonesia, transisi demokrasi yang digunakan tersebut adalah pola penggantian walaupun tidak dipungkiri

¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari kasus konflik elit partai politik berindikasikan *conflict of interest* hingga konflik Poso, Ambon, Sampit dan sebagainya yang lebih banyak konflik berbau SARA.

¹¹ Model-model transisi ini lebih jauh lihat Samuel P. Huntington, *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century*; London : University of Oklahoma Press, 1991.

⁹ Lihat NT Budi Harjanto, *Studi Pembangunan Politik: dari Modernisasi ke Demokratisasi*, Analisis CSIS, 1998.

juga ada warna intervensi dari komunitas internasional.

Pada konsep demokrasi yang berarti kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sebenarnya gagasan yang sangat fundamental dalam memaknai penggunaan kekuasaan (*power*). Suatu wewenang kekuasaan yang mana penggunaannya didapatkan melalui legitimasi proses-proses demokratis, yakni pemilihan umum. Akan tetapi, seringkali dapat kita jumpai terjadi pembelokan dari amanat kekuasaan itu terkadang "dibajak" oleh elit penguasa untuk kemudian digunakan demi ambisi kelompoknya. Inilah wujud awal deviasi dan pembajakan demokrasi yang dilakukan elit oligarkis. Ditengah kondisi objektif seperti itu, kemudian dengan dalih demokratisasi kepentingan internasional masuk dengan dibarengi mengguritanya demokrasi pasar (*neo-liberalisme*) diseluruh negara, termasuk Indonesia. Sedangkan demokrasi pasar sejatinya dibawa oleh berbagai lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Kedua lembaga yang membawa misi liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, mampu masuk ke setiap penjuru negara dengan memanfaatkan celah-celah instabilitas politik disuatu negara yang sedang mengalami proses transisi demokrasi tersebut. Contoh nyata adalah bagaimana IMF bisa masuk ke Indonesia dimulai melalui penandatanganan Letter of Intent yang dilakukan antara Indonesia dengan IMF, 15 Januari 1998, yang mana situasi saat itu rezim tergerogoti dan mulai goyah. Pada saat itulah awal malapetaka demokrasi pasar atau neo-liberalisme untuk konteks Indonesia, dimulailah gendang untuk ditabuh. Pasca penandatanganan tersebut privatisasi,

liberalisasi, deregulasi, dan penghapusan subsidi publik begitu menggurita tanpa terkendali oleh masyarakat sipil, militer maupun rezim berkuasa sekalipun¹².

Simplifikasinya adalah dalam situasi seperti itu, negara (*state*) hanya sekedar difungsikan sebagai regulator semata. Negara tidak berwenang dalam mengontrol ruang ekonomi, semua diserahkan kepada mekanisme pasar. Imbasnya, prinsip *survival of the fittes* berlaku. Bagi mereka yang miskin dan tidak mempunyai hanya bisa menahan lapar dan menunggu mati akibat minimnya subsidi pemerintah. Pada titik ini, ketika negara sekedar berfungsi sebagai lembaga regulator, maka sebenarnya dan sejatinya ia tidak merdeka lagi. Sebab dibelakang layar, kewajiban dan kewenangan negara, salah satunya untuk menyejahterakan rakyat, telah dibajak rezim neo-liberalisme dengan baju demokrasi pasar. Dan atas nama demokrasi, mekanisme penjajahan (*kolonialisme*) dalam bentuk baru telah berlangsung. Ia tertanam dan tertancap melalui saluran yang kasat mata alias bukan dalam wujud penjajahan fisik. Kolonialisme sekarang berjalan melalui penguasaan aset publik disuatu negara. Sehingga keyakinan bahwa ketika transisi demokrasi berlangsung akan terjadi pula konsolidasi demokratik, situasi tersebut malah berbalik arah menjadi konsolidasi oligarkis kekuasaan ekonomi. Maka imbasnya, demokrasi mengalami mal-fungsi.

Dalam kasus menentang demokrasi pasar yang berwujud neo-liberalisme, sebenarnya dapat menengok yang terjadi di dua negara, Argentina dan Rusia, yang keduanya juga dalam situasi transisi demokrasi. Di

¹² Dalam rezim reformasi ini kasus privatisasi terlihat jelas pada era Presiden Megawati.

kedua negara tersebut dimana gerakan pro-demokrasi berjuang dengan gigih dalam membangun demokrasi yang dengan tegas menolak agenda neo-liberal (*democratization against neo-liberalism*). Beragam fakta bahwa gagalnya demokrasi, semakin menguatnya oligarki, adalah akibat sistem demokrasi pasar yang lebih menitikberatkan pada mekanisme liberalisasi ekonomi, privatisasi, dan penghapusan subsidi. Situasi dan kondisi yang terjadi di dua negara tersebut bisa dijadikan pelajaran berharga bagi masyarakat sipil Indonesia. Sebab, transisi demokrasi yang berujung pada neo-liberalisme hanya akan menyandera transisi demokrasi dan akan menjerumuskan pada krisis yang tak kunjung usai. Hal inilah sebab utama bagaimana Indonesia tak mampu bangkit cepat menghadapi krisis yang melanda. Dalam situasi tersebut, demokrasi bukan lagi vis-à-vis otoritarianisme. Tetapi pemilihan demokrasi (pasar) lebih condong dipilih kepada model apa dan untuk kepentingan siapa. Inilah wujud pembajakan demokrasi pada masa transisi. Dalam analisis Thomas Carothers, bahwa gagalnya transisi menuju demokrasi disebabkan domain ekonomi dan domain politik yang secara tegas dipisahkan, bukan disatukan. Situasi ini mengandaikan bahwa ekonomi dan politik (pasar dan negara) hanya berhubungan secara terpisah dan tidak berkorelasi sama sekali. Maka tidaklah berlebihan bila sekarang ini negara (Indonesia) semata diposisikan sebagai regulator modal, bahkan bisa lebih parah lagi sebagai "komprador" kapital. Semua produk hukum negara hanya melayani berjalannya mekanisme modal¹³. Sebab

jika negara memasuki wilayah tersebut akan bertentangan dengan kekuatan pasar (*free trade*). Artinya pengaturan negara juga akan tidak sinkron dengan logika globalisasi dimana modal transnasional bebas berpindah tempat. Maka pada proses transisi demokrasi ini sudah seharusnya tidak terjebak logika dan imajinasi bahwa proses transisi akan selalu menuju arah yang lebih baik. Sebab, sebagaimana diyakini bersama demokrasi yang dikonstruksi oleh kekuatan asing, melalui tekanan rezim lembaga internasional, bukan mengarah pada demokrasi sesungguhnya. Namun semakin menenggelamkan pemerintah dan rakyat untuk tunduk pada doktrin khas neo-liberalisme yakni liberalisasi-privatisasi-deregulasi.

Transisi Demokrasi; penguatan Civil Society

Reformasi telah disepakati sebagai momentum peralihan dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratis dalam perjalanan sejarah bangsa. Tapi hingga saat ini, setelah sekian tahun kita lalui perjalanan reformasi kenyataannya justru transisi demokrasi di Indonesia mengalami kebuntuan. Contohnya kita melihat partisipasi politik masyarakat dalam rangka menentukan kebijakan pemerintahan sering tidak berjalan baik. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda transisi demokrasi kita akan bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat bawah. Tumbangnya rezim orde Baru memungkinkan diselenggarakan system pemilu multi partai, maka sejak itu gerakan transisi demokrasi mulai menemukan momentumnya. Masyarakat pasca reformasi

¹³ Lihat saja contohnya Pasal-pasal revisi UU Ketenagakerjaan yang marak ditolak oleh kalangan

buruh dan sangat didukung para pengusaha besar.

mengharapkan hadirnya partai-partai baru sebagai prakondisi bagi terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga nantinya akan tercipta iklim demokrasi yang sehat. Sehingga banyak pekerjaan NGO seperti penyedaran politik rakyat diharapkan bisa dikerjakan partai, karena hal itu pada dasarnya merupakan tugas utama partai. Namun dalam perjalanannya partai politik yang ada lebih mementingkan politik kekuasaan ketimbang pendidikan politik rakyat, sehingga pemilu bukan menjadi sarana pendidikan politik, melainkan hanya untuk mobilisasi dukungan suara. Maka terjadi kesenjangan cukup lebar antara rakyat dengan partai politik dan politisi yang menjadi wakil rakyat di DPR. Sementara itu, pelaku politisi yang berkiprah di parlemen semakin hari menunjukkan perilaku dan sikap yang menimbulkan antipati masyarakat luas. Bahkan tak jarang anggota parlemen dan penyelenggara negara semakin mempertajam perasaan ketidakadilan di tengah rakyat yang sudah kecewa dengan praktek kekuasaan di era reformasi.

Kondisi diatas mengingatkan pada studi Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter dalam mencermati transisi demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Selatan. Tatkala merangkum gagasan dan analisis mengenai proses transisi dari kekuasaan otoriter menuju demokrasi beberapa negara di Amerika Latin dan Eropa Selatan itu, O'Donnell dan Schmitter menemukan suatu kesimpulan bahwa transisi dari suatu rezim otoriter tidak selalu dan tidak selamanya menuju konsolidasi,

melainkan sangat mungkin bergerak ke arah yang lain¹⁴. Pandangan ini paralel dengan pandangan Larry Diamond (2004) yang menggambarkan situasi "gerak ke arah lain yang belum jelas" ini di banyak negara demokrasi baru di Asia dan Amerika Latin, yang akhirnya mencuatkan kerawanan. Karena memang situasinya lebih sulit dan kompleks lantaran kegagalan civil society untuk mempertahankan, mengkonsolidasikan, memberikan vitalitas dan makna kepada demokrasi itu sendiri. Diamond tak menyangkal transisi itu bisa menuju apa yang disebutkan sebagai gerak ke arah "sesuatu yang lain" dengan gejala anomali dan abnormalitas atau dapat dikatakan sebagai "*the abnormality of transition*", yang ditandai dengan pemerintahan plutokrasi yang lemah, Oligarkisme, Korupsi, Kekerasan, Konflik, Identitas, Politik uang, rusaknya penegakan hukum, dan instabilitas politik¹⁵.

Dalam fase transisi saat ini, telah lama terdengar aspirasi masyarakat bisa dengan mudah ditundukkan oleh kekuatan materi (capital). Uang telah menjelma menjadi satu kekuatan baru dalam mekanisme demokrasi di negeri ini. Hampir dalam setiap momen politik baik dalam skala lokal, regional bahkan nasional, selalu melibatkan unsur uang tidak sedikit pihak yang menyuarakan ajakan untuk menghindari campur tangan uang dalam proses politik, namun

¹⁴ Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter, *Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusion About Uncertain Democracies*, 1986.

¹⁵ Larry Diamond, *Beyond Authoritarianism and Totalitarianism*, Washington Quarterly, Vol.12, 1., 1989.

kenyataan praktek *money politics* tetap berlangsung bahkan seolah telah menjadi prasyarat keberhasilan untuk mencapai kemenangan. Realitas ini menggambarkan betapa mudahnya uang memanipulasi sebuah kebenaran. Di sinilah kita melihat peranan para calo. Tidak hanya calo politik, melainkan juga calo media massa yang mampu menghipnotis publik seolah-olah mereka pantas menjadi pemimpin. Gejala ini menggambarkan proses transisi demokrasi sebagaimana dikatakan Schmitter, terlalu banyak era transisi memunculkan penumpang gelap pencari keuntungan dari ketidakpastian era transisi. Mereka sekarang sangat banyak dijumpai di publik dengan berbagai kedok, sok reformis, mengkritik, dan provokasi. Di balik itu semua, ujung-ujungnya rakyat dijadikan objek pelengkap penderita dalam berbagai permainan politik. Sementara rakyat tetaplah rakyat yang tidak punya kedaulatannya, tetap termarginalisasi dari akses-akses politik dan ekonomi.

Elit Politik Era Transisi Demokrasi; penguatan Regulasi

Terbukanya kran demokrasi sebagai buah dari gerakan reformasi yang telah digulirkan ternyata belum diiringi dengan kedewasaan politik para elit politik di negeri kita. Konflik kepentingan antar sesama elit seringkali diturunkan kepada massa akar rumput yang akibatnya sering menjadi konflik horizontal yang merugikan masyarakat luas. Penyimpangan perilaku dan penyelewengan sikap politik dari para elit masih mewarnai pemberitaan

media¹⁶. Kondisi ini tentu membawa dampak yang kurang baik terhadap transisi demokrasi di negeri ini. Terlalu cepatnya proses transisi ini berjalan kerap dijadikan alibi atas kecanggungan dan ketidaksiapan seorang politisi untuk beradaptasi dengan ide-ide transformatif. Padahal tugas elit politik dalam transisi ini adalah membuat regulasi yang membawa penguatan ke arah situasi system yang demokratis dalam proses transisi ini.

Rendahnya tingkat kedewasaan dan integritas politik para elit politisi kita hari ini tidak lepas dari pola rekrutmen yang mengantarkan mereka pada posisi politik strategis. Pemilu sebagai pintu masuk untuk berkiprah di ranah politik bagi politisi masih menjadi idealita yang jauh dari realita, meskipun tanda-tanda menuju ke arah perbaikan masih terus dilakukan. Terkadang tarikan kepentingan-kepentingan politik di internal partai sebagai pemasok utama politisi kerap kali mengabaikan kualitas dan kapabilitas seorang politisi yang akan berkiprah di panggung politik yang luas. Akibatnya karena tekanan dan desakan dari pihak yang memiliki otoritas lebih (*capital, power*) di internal partai, justru politisi yang dipromosikan oleh partai adalah politisi yang memiliki kapabilitas politik rendah namun memiliki kadar kepatuhan tinggi terhadap si pemilik otoritas tadi. Nilai ideologis yang semestinya harus menjadi pijakan dasar seorang politisi untuk berjuang kian samar, aliran dalam politik hanya sekedar komoditas politik, bukan untuk memperjuangkan nilai ideologi yang terkandung. Mereka tergantung pada pemilik modal. Ini yang menyebabkan ketidakmampuan

¹⁶ Kasus-kasus yang ditangani KPK, seperti Al-Amin Nasution dkk sebagai bukti penyimpangan dan penyelewengan elit politik terhadap demokrasi dan amanat rakyat.

pemerintah bertindak tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ini terjadi tidak hanya di pusat tapi juga di daerah dari kantor bupati sampai kantor kepala desa¹⁷. Mau tidak mau ini adalah sebuah realitas. Lihat saja apa yang sering disebut orang sebagai "calo politik". Dibalik percaloan itu ada kekuatan pemilik modal. Kepentingannya untuk melestarikan bisnisnya yang akan besar jika didukung kebijakan yang menguntungkan. Situasi politik yang berkembang di Indonesia hari ini adalah kolaborasi antara kekuasaan politik dan ekonomi. Padahal politik yang selama ini diwarnai politik aliran yang benar-benar memperjuangkan visi ideologisnya.

Relasi politik antara seorang politisi dengan konstituensinya masih belum menampakkan pola-pola mutualis dalam arti sebenarnya. Dapat dikatakan hubungan antara politisi dengan konstituennya hari ini adalah sebuah "simbiosis paratisme" dimana konstituen hanya dijadikan obyek eksploitasi dari ambisi politik seorang politisi. Tak jarang praktek pengatasnamaan rakyat terjadi di lingkaran elit untuk memuluskan suatu agenda politik meskipun si pemilik kedaulatan sejatinya tidak memahami jalan pikiran wakilnya. Seorang politisi benar-benar berkomunikasi dengan konstituennya hanya pada saat pelaksanaan pemilihan. Pasca terpilih, dirinya hanya sibuk mengatur apa yang harus dia kumpulkan kembali untuk dirinya sendiri.

Krisis ekonomi yang menjadi momentum pemicu munculnya fase transisi di Indonesia, menyebabkan

kekuatan pasar menjadi begitu dominan memainkan peranannya dibandingkan dengan partisipasi politik publik. Parahnya elit politisi telah menjadi subordinat dari situasi ini dan telah mengambil sikap untuk berkhidmat pada kepentingan "pemilik modal". Akibatnya, pasar adalah penentu kebijakan politik yang paling dominan. Dan pembuat kebijakan berada di bawah bayang-bayang pemilik modal, dan pasti mengalami ketergantungan pada mereka. Di situ kita bisa melihat semuanya bisa dibeli. Siapa memiliki modal, dialah penentu kebijakan politik. Praktek semacam ini membawa akibat mekanisme demokrasi tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Demokrasi lantas tidak lagi mengajarkan prinsip persamaan hak dan keadilan bagi setiap orang.

Prinsip demokrasi yang benar belum dipahami dan dipraktekkan oleh para elit politisi kita. Sehingga kran demokrasi yang terbuka lebar kini menjadi kian *absurd*, kalau pun ada sebagian pihak yang mengklaim bahwa demokrasi telah dipraktekkan, itu baru sampai pada batas prosedural *an sich*, karena partisipasi publik tidak dilibatkan. Publik hanya sekedar instrument dari kepentingan penguasa untuk mencari suara. Manakala suara diperoleh, publik ditinggalkan. Gambaran inilah yang menghiasi perilaku dan sikap elit politisi kita di era transisi ini, meski tidak dalam arti absolut kesemuanya.

Mengawal Transisi Demokrasi

Upaya pengawalan masa transisi demokrasi mutlak dilakukan, jika tidak maka kondisi ini akan menjadi bola liar yang sulit dikontrol. Meski cetak biru transisi yang dialami bangsa kita hari ini belum lagi tersusun, namun realitas faktual harapan masyarakat yang mendambakan berkah demokrasi

¹⁷ Fenomena ini marak seiring otonomi daerah (desentralisasi) berlangsung dengan di proses hukumnya para pejabat daerah Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD oleh KPK dan aparat hukum lainnya.

mesti ditangkap oleh elit politisi sebagai sebuah élan vital perjuangan. Tanpa adanya konsistensi sikap dan pemihakan yang jelas seorang elit politisi pada profesinya untuk mengabdikan pada kepentingan khalayak luas, rasanya sulit kita berharap angin perubahan ini akan berdampak positif bagi bangsa.

Agenda politik yang terus bergulir mengiringi perjalanan bangsa sudah semestinya dikawal dan didinamisir oleh aktor-aktor politik yang dewasa, kapabel dan terpenting memiliki jiwa alturistik yang kuat. Peristiwa konflik dan amuk sosial yang kerap mewarnai momen politik dalam transisi sedapat mungkin dieliminir demi menjaga wajah demokrasi kita yang masih berjalan. Untuk itu kerja elit politik seorang politisi sebisa mungkin tidak lepas dari nilai-nilai sakral agar dalam memainkan perannya tidak terjebak pada kepentingan sesaat yang berdimensi sempit. Rakyat hari ini sangat butuh ketauladanan dan kesantunan sikap politik dari elit politisi. Selain itu rakyat juga butuh bukti konkrit bahwa elit politisi mampu memberi kontribusi dan rakyat tidak terus-terusan dieksploitasi.

Kita tidak bisa berharap kedewasaan politik masyarakat akan muncul manakala kedewasaan politik elit belum terbangun. Sebab relasi politik antara elit politisi dan konstituennya lewat komunikasi yang lebih intens meski dalam situasi yang kurang sehat berpotensi mencerminkan sikap politik elit dan konstituennya. Jika elit politisi hanya menjadikan konstituen sebagai tameng dan alat legitimasi semata kita khawatir masa depan transisi demokrasi kita justru berujung pada anomali. Kita perlu membangun budaya baru yang didasarkan kepada pertimbangan

rasionalitas dalam pemilihan. Bukan lagi kepada mitos dan politik aliran, melainkan kepada pertimbangan integritas, kepribadian, serta moralitas calon. Politisi memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam upaya mendorong dan mengawal transisi demokrasi ini.

D. Penutup

Transisi menuju demokrasi bisa mengambil sejumlah bentuk. Dari segi waktu bisa berlangsung cepat atau perlahan-lahan. Kecepatan akan terjadi jika transformasi dipengaruhi sejumlah faktor baik domestik, misalnya adalah akomodasi atau pertentangan, serta faktor eksternal yakni komunitas dan rezim internasional. Transisi menuju demokrasi juga dapat menempuh pendekatan aktor pelaku perubahan itu sendiri. Jika elit politik rezim yang berkuasa mau melakukan akomodasi dengan pendukung pro-demokrasi maka seperti terjadi di Hongaria bisa terjadi transisi menuju demokrasi yang relatif mulus. Namun bentuk lain bisa juga terjadi seperti diperlihatkan dalam pengalaman Argentina, Cekoslowakia dan bahkan yang sedang dalam proses transisi seperti Indonesia. Adanya konsep-konsep masa transisi sebuah negara menuju demokrasi itu bisa membuka peluang untuk mengkaji lebih luas bagaimana transisi di suatu negara bisa terjadi dan mengapa terjadi seperti itu. Pilar-pilar dan prasyarat demokrasi juga sudah terkonstruksi, tinggal bagaimana para aktor baik elit, masyarakat sipil (civil society) menunjukkan kekuatannya untuk melaksanakan akselerasi transisi demokrasi dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung proses demokratisasi tanpa intervensi pihak, rezim internasional yang justru mengungkungnya sendiri. Jika pilar dan kunci transisi telah berjalan dengan

baik, maka tidaklah suatu impian jika demokrasi yang sejati akan tercapai dengan beradab dan bermartabat.

Daftar Pustaka

O'Donnell, Guillermo, Philippe C Schmitter and Laurence Whitehead (eds), *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986.

O'Donnell, Guillermo, Philippe C Schmitter, *Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusion About Uncertain Democracies*, 1986.

_____, *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (terjemahan), LP3ES : Jakarta, 1993.

Harjanto, NT. Budi, *Studi Pembangunan Politik: Dari Modernisasi ke Demokratisasi*. ANALISIS CSIS, Tahun XXVII/1998, No. 2.

Huntington, Samuel P., *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century*, London : University of Oklahoma Press, 1991

_____, *Gelombang demokratisasi ketiga*; Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, 2001.

Karim, Rusli M, *Peluang dan Hambatan Demokratisasi*, ANALISIS CSIS, Tahun XXVII/1998, No. 10.

Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru*, LP3ES : Jakarta, 1992.

Przeworski, Adam, *Democracy and The Market: Political and Economic reforms in Eastern Europe and Latin America*, Cambridge : University Press, 1991.

Scott, Gregory M., *Political Science: Foundations for a Fifth Millennium*. New Jersey, Prentice Hall, 1997.

Sargent, Lyman Tower, *Contemporary Political Ideologies*. Homewood, The Dorsey Press, 1981.